

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Fitri Mutmainnah dan Panji Purnomo (2020:57) melakukan penelitian dengan judul “Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Desa Jambu” menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal di desa tersebut sebagai warisan leluhur berperan meningkatkan kesadaran dan pemahaman diri dalam masyarakat, selain itu nilai kearifan lokal dapat dijadikan salah satu faktor pendukung kerukunan umat beragama.

Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah meneliti tentang kerukunan umat beragama. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu dalam metode penelitian, dimana peneliti sbelumnya menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Maria Dara Sintani, dkk (2021:129) dengan judul “Analisis Kehidupan Siswa Mengembangkan Budaya Lokal Di Lingkungan Sekolah Menengah Agama Katolik (Smak) Bhakti Luhur Malang” menunjukkan bahwa hidup dalam masyarakat multikultural membutuhkan pengetahuan dan pemahaman multikultural yang menerima keragaman, pluralisme, dan siap berkomunikasi secara setara dengan semua orang. Dalam menghadapi keragaman diperlukan sikap moderat, mengakui keberadaan pihak lain,

toleransi, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak melalui kekerasan.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang budaya lokal dan moderasi beragama, perbedaanya dengan penelitian sebelumnya adalah dalam metode penelitiannya.

Penelitian Masturaini (2021:97) dengan judul “Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Shohifatusshofa Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara)”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanaman nilai-nilai moderasi beragama di pondok pesantren bentuk sikap moderasi beragama, yaitu dengan memberikan pendalaman pengetahuan agama, selektif terhadap tenaga pengajar, dan akomodatif dengan budaya lokal.

Selain beberapa penelitian di atas, terdapat pula sejumlah penelitian lain yang relevan dengan tema moderasi beragama dan kearifan lokal sebagai penguat kerukunan umat beragama. Penelitian yang dilakukan oleh Anisaanisa (2025:250) berjudul “Peran Kearifan Lokal Sebagai Mediator dalam Hubungan Moderasi Beragama terhadap Kerukunan Umat Beragama di Indonesia” menunjukkan bahwa kearifan lokal berperan sebagai mediator dalam memperkuat hubungan antara moderasi beragama dengan kerukunan antarumat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menghasilkan temuan empiris bahwa semakin kuat penerapan nilai-nilai kearifan lokal, semakin tinggi tingkat kerukunan masyarakat lintas agama.

Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel yang dikaji, yaitu moderasi beragama dan kearifan lokal, sedangkan perbedaannya terdapat pada konteks penelitian dan objek kajian penelitian ini meneliti mahasiswa pada lingkungan pendidikan tinggi Buddha negeri, sementara penelitian Anisaanisa berfokus pada masyarakat umum.

Selanjutnya, penelitian oleh Joko Tri Haryanto (2021:38) dengan judul “Kontribusi Ungkapan Tradisional dalam Membangun Kerukunan Beragama” menekankan pentingnya simbol-simbol budaya dan ungkapan tradisional sebagai sarana komunikasi sosial dalam menciptakan keharmonisan antarumat beragama. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan etnografi di wilayah Bantul, yang menunjukkan bahwa kearifan lokal menjadi medium efektif untuk menumbuhkan rasa saling menghargai antaragama. Kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti hubungan antara budaya lokal dan kerukunan, namun perbedaannya terdapat pada pendekatan penelitian penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur pengaruh secara empiris, sedangkan penelitian Haryanto menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian oleh Khoiruddin (2023:235) berjudul “Moderasi Beragama dalam Kearifan Lokal pada Masyarakat Pesisir Barat Provinsi Lampung” juga menemukan bahwa nilai-nilai budaya pesisir, seperti gotong royong dan musyawarah, mendukung penguatan sikap moderat dalam kehidupan beragama. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus

pada mahasiswa, penelitian Khoiruddin berfokus pada masyarakat pesisir dan menggunakan metode observasi partisipatif.

Selain itu, Moh. Mul Akbar dan Marzuki (2020:43) melalui penelitian “Kearifan Lokal Masyarakat dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Kota Kupang, NTT” menunjukkan bahwa tradisi budaya lokal seperti sondeng dan ka’a mampu memperkuat rasa persaudaraan lintas agama. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan wawancara mendalam, sedangkan penelitian ini bersifat kuantitatif dengan analisis pengaruh antarvariabel.

Terakhir, Aksa dan Nurhayati (2020:345) dalam penelitiannya “Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Donggo di Bima” menjelaskan bahwa nilai-nilai tradisional seperti toleransi, gotong royong, dan musyawarah berperan dalam membangun kerukunan sosial. Perbedaannya terletak pada lokasi dan subjek penelitian — jika penelitian Aksa dan Nurhayati berfokus pada komunitas masyarakat tradisional, penelitian ini menitikberatkan pada mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi keagamaan dengan latar belakang multikultural.

Dengan demikian, dari berbagai kajian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi subjek, konteks, dan pendekatan metodologis, yaitu mengkaji pengaruh moderasi beragama dan nilai-nilai budaya lokal terhadap kerukunan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri menggunakan metode kuantitatif, yang belum pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Teoritis

1. Moderasi Beragama

a. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi asal berasal dari bahasa Latin *moderatio*, artinya ke-sedang-an (tidak berlebihan juga tidak kekurangan). Moderat juga dimaknai sebagai pengendalian diri dari sikap yang berlebihan dan kekurangan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat dua makna moderasi, yaitu mengurangi kekerasan dan menghindari keekstreman. Jika ada yang berkata, “orang itu bersikap moderat,” itu artinya orang tersebut bersikap biasa saja, wajar dan tidak ekstrem (Kementerian Agama RI, 2019:15). Moderasi berarti moderat yang berarti tidak berlebihan. Moderasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Menghindari kekerasan, dan 2. Menghindari keekstreman menurut (KBBI). Moderat artinya seimbang mengenai kepercayaan, moralitas, dan sifat, perlakukan terhadap individu lain, Saifuddin (2019:15).

Moderasi beragama adalah sikap seimbang atau jalan tengah dalam keragaman agama yang menghindari sikap ekstrem, fanatik dan revolusioner keagamaan serta menghargai, perbedaan keyakinan tentang praktik keagamaan. Dua kutub agama yang ekstrem, yaitu: ekstrem kanan dan ekstrem kiri, Saifuddin (2019:18).

Moderasi beragama artinya perbedaan kehidupan sosial untuk saling bertoleransi, saling menghormati, saling menghargai, untuk menciptakan kerukunan tanpa harus menimbulkan permasalahan. Keharmonis dan keseimbangan hidup bermasyarakat sebagai salah satu upaya penguatan moderasi beragama (*Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Agama*, 2019:120). Penerapan moderasi beragama dalam kehidupan sosial tersebut juga relevan diterapkan di lingkungan perguruan tinggi yang memiliki keberagaman latar belakang agama, budaya, suku, dan pandangan di kalangan mahasiswa.

Dalam konteks perguruan tinggi, moderasi beragama memiliki kedudukan penting karena mahasiswa berada dalam lingkungan yang mempertemukan berbagai latar belakang agama, budaya, suku, dan pandangan. Sukrawati, Putri, dan Wardana menjelaskan bahwa pendidikan agama di perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam membentuk karakter dan pemahaman keagamaan yang moderat pada mahasiswa. Keragaman pandangan agama, budaya, dan keyakinan di lingkungan perguruan tinggi membutuhkan sikap toleran agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik. Moderasi beragama pada mahasiswa dengan demikian dapat menjadi landasan untuk membangun harmoni sosial serta mencegah munculnya sikap eksklusif dan intoleran Sukrawati (2023:105).

Rahmawati dkk. juga menjelaskan bahwa toleransi beragama di perguruan tinggi merupakan nilai penting dalam masyarakat multikultural. Sikap toleransi mahasiswa dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan lingkungan sosial. Kehidupan kampus yang mempertemukan mahasiswa dari latar belakang agama yang berbeda dapat menjadi ruang untuk membangun sikap saling menghargai dan menerima perbedaan. Oleh sebab itu, moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui interaksi sosial yang terbuka, penghormatan terhadap keyakinan orang lain, serta kesediaan membangun kehidupan bersama secara harmonis Rahmawati (2023:1). Pemahaman mengenai moderasi beragama dalam kehidupan perguruan tinggi tersebut selanjutnya dapat dikaji melalui perspektif ajaran Buddha yang menekankan pentingnya menghindari pertengkaran, menyadari kebenaran, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Dalam pandangan agama Buddha, pertengkaran dapat berakhir dengan menyadari adanya kebenaran. Beberapa individu tidak mengetahui bahwa pertengkaran dapat membawa kehancuran (Dh.I.6). Jalan Ariya Berunsur Delapan (*ariya atthangika magga*) merupakan khotbah pertama Buddha yang mengajarkan Jalan Tengah di antara dua ekstrem, yaitu ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Terdapat dua hal yang harus dihindari oleh Bhikkhu, yaitu: (1) pemuasan nafsu-nafsu duniawi sebagai tujuan utama, yang rendah,

tidak bijaksana, dan hanya sesuai untuk orang-orang sesat; dan (2) menjalankan penyiksaan diri yang menyakitkan, merugikan, dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh.

Kedua bentuk ekstrem tersebut dapat dihindari dengan menjalankan Jalan Tengah (*majjima patipata*), yaitu jalan yang mengembangkan pandangan (*cakkhu*) dan pengetahuan (*nana*), yang membuahkan perdamaian (*vupasa-maya*), kebijaksanaan luhur (*abhinna*), terbukanya penerangan batin (*sambodhaya*), dan tercapainya pembebasan sempurna (*Nibbana*). Jalan Tengah (*Majma Patipada*) terletak di antara dua jalan yang ekstrem. Ajaran Jalan Tengah merupakan prinsip paling mendasar dalam Buddhisme untuk mencapai Nirwana. Jalan Mulia Berunsur Delapan terdiri dari: (1) pemahaman yang benar, (2) pikiran yang benar, (3) ucapan yang benar, (4) perbuatan yang benar, (5) kehidupan yang benar, (6) usaha yang benar, (7) perhatian, dan (8) konsentrasi Mukti (2020:36).

Moderasi beragama di definisikan selalu mengambil jalan tengah, bertindak adil, dan memiliki sikap dan perilaku yang seimbang. Oleh karena itu, umat Buddha selalu didorong mengembangkan sifat-sifat luhur: *metta*, *karuna*, *mudita* dan *upekkha*. Sifat luhur *upekkha* inilah yang harus dikembangkan. Kesimpulannya moderasi beragama adalah sikap moderat dengan menciptakan kedamaian penuh keseimbangan tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri terhadap keberagaman agama dengan pengamalan

agama sendiri serta menghormati agama dan kepercayaan agama lain.

Moderasi beragama merupakan sikap yang menekankan keseimbangan, jalan tengah, dan pengendalian diri dalam menjalankan kehidupan beragama dengan menghindari sikap berlebihan, kekerasan, dan keekstreman. Moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan cara seseorang menjalankan keyakinannya, tetapi juga tercermin dalam sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan agama serta keyakinan orang lain. Dalam kehidupan sosial, moderasi beragama diwujudkan melalui toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan membangun kehidupan yang harmonis tanpa menimbulkan konflik. Dalam perspektif Buddha, prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Jalan Tengah (*Majjhima Paṭipadā*) yang mengajarkan untuk menghindari dua bentuk ekstrem serta mengembangkan kebijaksanaan, kedamaian, dan keseimbangan dalam kehidupan. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai sikap yang mengutamakan keseimbangan, kedamaian, toleransi, dan kerukunan dalam menghadapi keberagaman, dengan tetap menjalankan keyakinan agama sendiri serta menghormati agama dan kepercayaan orang lain.

b. Moderasi Beragama Dalam Agama Buddha

Konsep moderasi beragama dalam ajaran Buddha merupakan landasan penting dalam mewujudkan keseimbangan sikap dan perilaku umat dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Ajaran ini tercermin dalam beberapa teks suci, antara lain *Majjhima Nikāya* (*Sutta 26: Ariyapariyesanā Sutta*), *Dhammapada* ayat 183, dan *Karaniya Mettā Sutta*. Dalam *Ariyapariyesanā Sutta*, Sang Buddha mengajarkan prinsip menghindari dua ekstremitas, yaitu kenikmatan indria yang berlebihan dan penyiksaan diri yang menyakitkan, dengan menempuh Jalan Tengah (*Majjhima Paṭipadā*) sebagai dasar praktik menuju keseimbangan batin dan pencerahan. Prinsip ini menjadi cerminan nyata dari moderasi beragama, yang menekankan pentingnya sikap tidak berlebihan, tidak fanatik, serta mampu bersikap bijaksana dalam menghadapi perbedaan pandangan dan keyakinan.

Selanjutnya, *Dhammapada* ayat 183 memperkuat dasar moral moderasi dengan ajaran “tidak berbuat jahat, menumbuhkan kebajikan, dan menyucikan pikiran,” yang berfungsi sebagai pedoman etis dalam menjaga harmoni diri dan lingkungan sosial. Nilai-nilai tersebut diperkuat melalui *Karaniya Mettā Sutta*, yang menegaskan pentingnya pengembangan cinta kasih universal (*mettā*) sebagai wujud nyata dari moderasi dalam tindakan.

Melalui praktik cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk, umat Buddha diajak untuk menghindari kebencian, kekerasan, serta perpecahan, dan sebaliknya menumbuhkan perdamaian, toleransi, dan saling menghormati. Dengan demikian, ajaran-ajaran tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam Buddhisme tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam membentuk sikap spiritual, moral, dan sosial yang harmonis.

c. Indikator Moderasi Beragama

Berdasarkan Kementerian Agama (Kemenag, 2019), terdapat empat dimensi utama moderasi beragama, yaitu:

1) Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan dimensi fundamental dalam moderasi beragama yang menegaskan kesetiaan terhadap ideologi negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dimensi ini mengajarkan bahwa keberagamaan harus selaras dengan semangat nasionalisme dan cita-cita kebangsaan. Seorang yang moderat dalam beragama tidak hanya mengamalkan ajaran spiritual, tetapi juga menunjukkan kecintaannya

kepada tanah air serta berpartisipasi aktif dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama, komitmen kebangsaan berfungsi sebagai landasan moral dan ideologis yang mencegah munculnya sikap fanatik, radikal, atau eksklusif. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, seseorang dapat menempatkan ajaran agama sebagai sumber inspirasi moral yang memperkuat rasa kebersamaan, bukan sebagai alat pemisah antar kelompok. Oleh karena itu, dimensi ini menumbuhkan kesadaran bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman dan bentuk nyata dari tanggung jawab spiritual terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Toleransi

Dimensi toleransi merupakan inti dari praktik moderasi beragama yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan, pandangan, dan cara beribadah orang lain. Toleransi bukan berarti menyamakan semua agama, melainkan memberi ruang bagi setiap individu untuk menjalankan keyakinannya dengan damai tanpa gangguan maupun diskriminasi. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, toleransi

menjadi pondasi kerukunan sosial dan katalisator bagi terciptanya keharmonisan antarumat beragama.

Sikap toleran tercermin dalam kemampuan seseorang untuk mendengarkan, berdialog, dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Dengan demikian, toleransi bukanlah bentuk kompromi terhadap kebenaran iman, tetapi sebuah pengakuan atas hak kemanusiaan dan keberagaman ciptaan Tuhan. Toleransi juga mengandung unsur empati sosial, yakni memahami posisi orang lain, menghormati batas-batas keyakinan, serta tidak memaksakan kehendak pribadi atau kelompok dalam urusan keagamaan.

3) Anti Kekerasan

Dimensi anti kekerasan menegaskan bahwa ajaran agama pada hakikatnya mengandung pesan damai (peaceful teaching) yang menolak segala bentuk kekerasan, baik verbal, simbolik, maupun fisik. Dalam konteks moderasi beragama, dimensi ini mengajarkan bahwa perbedaan pandangan keagamaan tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan atau pemaksaan, melainkan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan persuasif.

Prinsip anti kekerasan mengandung makna bahwa kekuatan spiritual sejati terletak pada kemampuan mengendalikan diri, bukan dalam melampiaskan amarah. Seorang moderat beragama berusaha menjadi penengah dan penyejuk, bukan penyulut konflik. Dalam kehidupan sosial, dimensi ini memperkuat nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), kemanusiaan universal, dan etika sosial yang menghormati keberagaman. Dengan demikian, anti kekerasan bukan hanya menolak tindakan ekstrem secara fisik, tetapi juga menolak ujaran kebencian, fitnah, serta tindakan diskriminatif yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

4) Penerimaan terhadap Tradisi dan Budaya Lokal

Dimensi penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal menunjukkan fleksibilitas dan kontekstualitas agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Agama tidak hadir dalam ruang hampa budaya; ia tumbuh dan berkembang seiring dengan nilai-nilai lokal yang telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat. Dimensi ini mengajarkan bahwa selama suatu tradisi atau praktik budaya tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama, maka tradisi

tersebut dapat diakomodasi sebagai bagian dari ekspresi keberagamaan.

Sikap terbuka terhadap budaya lokal menjadi ciri khas moderasi beragama di Indonesia. Misalnya, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, tenggang rasa, dan sopan santun yang berasal dari budaya Nusantara justru memperkaya praktik keberagamaan. Penerimaan terhadap budaya lokal juga berfungsi sebagai jembatan dialog antaragama, karena nilai-nilai kemanusiaan universal sering kali ditemukan dalam tradisi lokal masyarakat. Dengan demikian, dimensi ini tidak hanya menjaga keberlanjutan warisan budaya bangsa, tetapi juga memperkuat identitas keagamaan yang inklusif, humanis, dan kontekstual.

d. Implementasi Moderasi Beragama di Kampus Buddhis

Implementasi moderasi beragama di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Raden Wijaya Wonogiri merupakan bentuk nyata dari komitmen lembaga pendidikan tinggi Buddhis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan saling menghormati antarumat beragama. Implementasi ini tercermin melalui berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik yang dirancang untuk memperkuat pemahaman dan praktik moderasi beragama di kalangan sivitas akademika. Bentuk

konkret pelaksanaan moderasi beragama di STABN Raden Wijaya diwujudkan melalui kegiatan lintas iman, diskusi sosial, serta pengabdian masyarakat yang bersifat multikultural. Kegiatan lintas iman dilakukan melalui forum dialog antaragama dan kerja sama dengan lembaga keagamaan lain, yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling memahami serta memperkuat relasi sosial yang harmonis antarumat beragama.

Selain itu, kegiatan diskusi sosial dan seminar kebangsaan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengkaji isu-isu toleransi, perdamaian, serta peran agama dalam memperkuat persatuan bangsa. Sementara itu, program pengabdian kepada masyarakat multikultural dilaksanakan melalui kegiatan sosial di daerah dengan keragaman agama dan budaya, sebagai bentuk praktik langsung penerapan nilai moderasi dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dilatih untuk berinteraksi secara terbuka, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan empati terhadap sesama tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau budaya.

Dalam konteks kelembagaan, peran dosen dan organisasi mahasiswa menjadi faktor penting dalam menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Dosen berperan sebagai pembimbing dan teladan dalam memberikan pemahaman konseptual melalui mata kuliah seperti Etika Buddhis, Pendidikan

Karakter, dan Filsafat Agama, yang memuat nilai-nilai moderasi, toleransi, serta kebajikan universal. Sementara itu, organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Jususan (HMJ) berperan dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut melalui kegiatan sosial, bakti masyarakat, serta forum lintas kampus yang mengusung semangat keberagaman.

Secara filosofis, pelaksanaan moderasi beragama di STABN Raden Wijaya berlandaskan pada ajaran mettā-karuṇā (cinta kasih dan belas kasih) dalam ajaran Buddha. Nilai mettā-karuṇā menjadi fondasi moral dan spiritual bagi sivitas akademika dalam bersikap terbuka, menghargai perbedaan, serta membangun kehidupan kampus yang damai dan harmonis. Dengan demikian, implementasi moderasi beragama di STABN Raden Wijaya tidak hanya berorientasi pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sikap hidup moderat yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencetak generasi yang berwawasan kebangsaan, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal.

e. Relevansi Moderasi Beragama terhadap Kerukunan

Moderasi beragama memiliki relevansi yang kuat terhadap terwujudnya kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat yang majemuk. Nilai-nilai utama dalam moderasi beragama, seperti

sikap toleransi (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), dan keadilan (*'adl*), berperan penting dalam mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Hasil penelitian Munif, Setiawan, dan Miranina (2022:85) menunjukkan bahwa tingkat moderasi beragama berpengaruh positif terhadap kerukunan umat beragama di Kota Kediri. Semakin tinggi pemahaman dan penerapan moderasi beragama, maka semakin kuat pula ikatan sosial serta rasa saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda.

Selanjutnya, penelitian Sutrisno dan Marsidi (2024:303) memperkuat temuan tersebut dengan menegaskan bahwa moderasi beragama menjadi instrumen penting dalam membangun kerukunan sosial di Desa Sidodadi, Kabupaten Malang. Melalui penerapan nilai-nilai moderasi, seperti penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, dialog lintas agama, dan penguatan empati sosial, masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang damai dan inklusif. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi praksis yang mampu memperkuat solidaritas, mencegah konflik berbasis agama, serta menjaga stabilitas sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama memiliki relevansi yang signifikan terhadap terciptanya kerukunan antarumat beragama. Nilai-nilai moderasi seperti toleransi, keseimbangan, dan keadilan berperan sebagai

fondasi dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Implementasi moderasi beragama yang diterapkan melalui dialog lintas iman, kerja sama sosial, serta penguatan empati antarindividu mampu mencegah potensi konflik dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya menjadi konsep moral atau teologis, tetapi juga strategi praktis dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam konteks masyarakat majemuk.

2. Implementasi Nilai Budaya Lokal

a. Pengertian Budaya

Makna kebudayaan telah berkembang secara luas seiring dengan perhatian para sejarawan, sosiolog, dan kritikus sastra terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan hasil karya seni, tetapi juga mencakup sikap, nilai, perilaku, serta berbagai bentuk kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Secara etimologis, budaya berasal dari bahasa Sanskerta **buddayah**, yang merupakan bentuk jamak dari **buddhi** yang berarti pikiran dan akal. Dengan demikian, kebudayaan berkaitan erat dengan kemampuan manusia dalam menggunakan pikiran dan akalnya untuk membentuk kehidupan sosial Dany Miftah dkk (2022:2).

Pengertian kebudayaan tersebut kemudian berkembang menjadi konsep yang lebih luas karena kebudayaan tidak hanya

berkaitan dengan aspek pikiran, tetapi juga mencakup berbagai pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Taylor melalui bukunya **Primitive Culture** menjelaskan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang berkembang dan dipelajari dalam lingkungan sosial Ranjabar (2006: 43).

Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan sering dipahami melalui berbagai hasil karya dan kemampuan manusia, seperti keterampilan menari, menyanyi, melukis, bermain peran, maupun kemampuan dalam membangun berbagai bangunan dan tempat ibadah. Namun, kebudayaan tidak hanya terbatas pada hasil karya yang bersifat material. Di dalamnya juga terdapat nilai, norma, pengetahuan, gagasan, kebiasaan, dan pola perilaku yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dipahami sebagai sesuatu yang mencakup aspek material maupun nonmaterial yang berkembang melalui kehidupan manusia.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, kebudayaan juga dapat dilihat sebagai hasil dari proses kehidupan masyarakat yang

diwujudkan melalui karya, rasa, dan cipta. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya berkaitan dengan kemampuan manusia menghasilkan berbagai bentuk teknologi dan kebudayaan kebendaan, sedangkan rasa mencakup nilai-nilai kemasyarakatan yang digunakan untuk mengatur kehidupan bersama dan cipta berkaitan dengan kemampuan berpikir manusia dalam menghasilkan pengetahuan maupun berbagai bentuk pemikiran. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat karena lahir dari aktivitas, pemikiran, dan nilai yang berkembang dalam kehidupan sosial.

Pandangan mengenai kebudayaan sebagai sesuatu yang dipelajari dan diwariskan tersebut diperkuat oleh Koentjaraningrat yang menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar (Koentjaraningrat, 2009:144). Pengertian ini menunjukkan bahwa kebudayaan mencakup gagasan atau nilai yang terdapat dalam pikiran manusia, tindakan yang diwujudkan dalam kehidupan sosial, serta hasil karya yang dihasilkan manusia. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya berupa warisan dari generasi sebelumnya,

tetapi juga dapat berkembang melalui proses belajar, pengalaman, dan interaksi sosial.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, kebudayaan dapat dipahami sebagai keseluruhan sistem gagasan, nilai, pengetahuan, norma, kebiasaan, tindakan, serta hasil karya manusia yang berkembang melalui proses belajar dan kehidupan sosial. Kebudayaan tidak hanya menjadi identitas suatu kelompok masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk sikap, perilaku, dan hubungan sosial. Dalam penelitian ini, kebudayaan lebih diarahkan pada nilai-nilai budaya lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam berinteraksi, menghargai perbedaan, membangun hubungan sosial, dan menciptakan kerukunan.

b. Budaya Lokal

Setiap individu yang lahir dan tumbuh dalam suatu lingkungan masyarakat akan hidup dalam budaya tertentu. Proses internalisasi budaya menyebabkan nilai, norma, kebiasaan, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat secara perlahan merasuk dan menjadi bagian dari kehidupan individu sehingga memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Melalui proses tersebut, seseorang belajar mengenal perilaku yang dianggap baik maupun buruk serta menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku di

lingkungan sosialnya. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan budaya Jawa akan mempelajari dan mempertimbangkan norma-norma budaya Jawa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, proses internalisasi budaya berperan dalam membentuk pola perilaku individu sekaligus membantu seseorang memahami dan menjalankan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Adat istiadat dan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu komunitas tertentu merupakan bagian dari budaya lokal. Budaya lokal sering dikaitkan dengan budaya etnis karena memiliki karakteristik yang membedakan suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Kekhasan etnis terbentuk melalui proses interaksi budaya dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Budaya lokal dalam konteks tersebut berkaitan dengan identitas individu maupun kelompok karena karakteristik budaya yang dimiliki menjadi bagian dari kehidupan dan identitas masyarakat Tedi Sutardi (2007:11). Dengan demikian, budaya lokal tidak hanya menunjukkan ciri khas suatu daerah, tetapi juga menjadi bagian dari identitas yang membentuk cara masyarakat menjalani kehidupan sosial.

Budaya lokal merupakan budaya yang berasal dan berkembang dalam suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Budaya lokal dapat berupa nilai-nilai yang bersumber dari

kehidupan masyarakat dan diperoleh melalui proses pembelajaran dari waktu ke waktu. Nilai-nilai tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk budaya, seperti kesenian, tradisi, kebiasaan, maupun hasil karya masyarakat. Salah satu contoh budaya lokal Indonesia adalah wayang yang merupakan salah satu bentuk kebudayaan warisan leluhur yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat Dany Miftah dkk (2022:5). Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal dapat diwariskan dari generasi sebelumnya sekaligus mengalami perkembangan sesuai dengan kehidupan masyarakat yang menjalankannya.

Budaya lokal juga dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang dihasilkan dan berkembang secara alami dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat serta diperoleh melalui proses pembelajaran. Kesenian, tradisi, pola pikir, dan hukum adat merupakan beberapa bentuk yang dapat mencerminkan budaya lokal. Keberagaman masyarakat Indonesia menyebabkan setiap daerah memiliki karakteristik budaya yang berbeda. Budaya lokal pada dasarnya merupakan budaya asli yang menjadi ciri khas suatu kelompok masyarakat setempat. Dalam pandangan J.W. Ajawaila, budaya lokal merupakan ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal. Meskipun demikian, budaya lokal tidak selalu bersifat statis karena dapat mengalami perubahan dan perkembangan akibat

adanya interaksi antara masyarakat dengan lingkungan maupun kelompok masyarakat lainnya.

Budaya lokal dapat pula dilihat berdasarkan tingkatan budaya dalam kehidupan sosial masyarakat. Abidin menjelaskan beberapa tingkatan kebudayaan, yaitu (1) superculture, (2) culture, (3) subculture, dan (4) counter-culture. Superculture merupakan kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk kebudayaan nasional. Culture dapat berkaitan dengan kebudayaan berdasarkan suku, pekerjaan, atau daerah, sedangkan subculture merupakan bagian dari kebudayaan yang berkembang dalam kelompok tertentu. Adapun counter-culture memiliki kedudukan yang sama dengan subculture, tetapi memiliki kecenderungan bertentangan dengan kebudayaan induknya Abidin (2014:167). Pembagian tersebut menunjukkan bahwa budaya memiliki tingkatan dan ruang lingkup yang beragam sesuai dengan kelompok sosial yang mengembangkan dan menjalankannya.

Dalam kerangka sosial budaya Indonesia yang memiliki struktur masyarakat yang majemuk, budaya lokal menempati posisi penting sebagai salah satu unsur yang menunjukkan identitas suatu kelompok masyarakat. Budaya lokal tidak hanya berkaitan dengan kebudayaan tradisional atau warisan nenek moyang, tetapi juga mencakup berbagai nilai, aktivitas, dan hasil aktivitas yang masih berkembang serta disepakati oleh masyarakat. Menurut Nawari

Ismail (2011:43), yang dimaksud budaya lokal adalah semua ide, aktivitas dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok masyarakat di lokasi tertentu. Budaya lokal tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Dengan demikian sumber budaya lokal bukan hanya berupa nilai, aktivitas dan hasil aktivitas tradisional atau warisan nenek moyang masyarakat setempat, namun juga semua komponen atau unsur budaya yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi ciri khas dan atau hanya berkembang dalam masyarakat tertentu.

Pemahaman mengenai budaya lokal tersebut dapat diperkuat melalui konsep kearifan lokal yang dikemukakan Sibarani. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial. Sibarani mengidentifikasi berbagai nilai kearifan lokal, antara lain kesejahteraan, kerja keras, disiplin, pendidikan, gotong royong, pelestarian dan kreativitas budaya, kedamaian, kesopansantunan, kejujuran, kesetiakawanan sosial, kerukunan dan penyelesaian konflik, komitmen, pikiran positif, serta rasa syukur Sibarani (2012:135).

Teori tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu kelompok masyarakat, tetapi juga memiliki nilai yang dapat mengarahkan perilaku individu dalam

kehidupan bersama. Nilai seperti kesopansantunan, gotong royong, kedamaian, kerukunan, dan penyelesaian konflik memiliki hubungan erat dengan pembentukan hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, budaya lokal dapat menjadi pedoman bagi individu untuk menghargai orang lain, menjaga hubungan sosial, menyelesaikan perbedaan secara baik, dan membangun kehidupan bersama yang rukun.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, budaya lokal dapat dipahami sebagai keseluruhan nilai, norma, gagasan, kebiasaan, tradisi, aktivitas, dan hasil karya yang tumbuh serta berkembang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, diperoleh melalui proses pembelajaran dan internalisasi, diwariskan antargenerasi, serta disepakati sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Dalam penelitian ini, budaya lokal lebih diarahkan pada nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya nilai budaya Jawa yang dapat menjadi pedoman mahasiswa dalam berinteraksi, menghargai perbedaan, membangun hubungan sosial, dan menciptakan kerukunan di lingkungan perguruan tinggi.

c. **Budaya Jawa**

Budaya Jawa merupakan sistem nilai, norma, dan tata laku yang menjadi pedoman hidup masyarakat Jawa dalam berinteraksi dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Menurut Koentjaraningrat (2009:3), budaya Jawa mencerminkan pandangan

hidup yang menekankan keseimbangan, ketertiban sosial, dan pengendalian diri untuk mencapai harmoni dalam kehidupan. Geertz (1983) menambahkan bahwa budaya Jawa memiliki lapisan simbolik yang kompleks, di mana setiap perilaku sosial mengandung makna filosofis dan religius yang mendalam. Sementara itu, Adisti (2018:216) menunjukkan bahwa budaya Jawa di era modern tetap memiliki relevansi dalam pembentukan karakter melalui internalisasi nilai unggah-ungguh. Nilai tersebut mencakup tata krama, andhap asor (rendah hati), dan tepa slira (toleransi), yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembentukan karakter berbasis kearifan lokal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan pendidikan karakter berbasis unggah-ungguh dapat meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya Jawa dalam kehidupan mahasiswa

Nilai-nilai budaya Jawa tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal tidak hanya berupa warisan tradisi, tetapi juga mengandung pedoman moral yang dapat membentuk cara seseorang bersikap dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan sosial, penerapan nilai unggah-ungguh, andhap asor, dan tepa slira dapat mendorong terciptanya sikap saling menghormati, menghargai perasaan orang lain, serta menjaga perilaku agar tidak menimbulkan konflik.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Widiyanti yang menjelaskan bahwa tepa selira sebagai salah satu nilai budaya Jawa mengandung nilai menghormati hak orang lain, menyayangi sesama, serta menjaga sikap, perkataan, dan tingkah laku dalam berinteraksi. Nilai tepa selira juga berkaitan dengan pengembangan empati karena mendorong seseorang untuk memahami perasaan dan keadaan orang lain. Dengan demikian, penerapan nilai tepa selira dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan sosial yang saling menghargai dan mengurangi perilaku yang dapat menimbulkan konflik (Widiyanti, 2024:83–87).

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern, nilai-nilai budaya Jawa tetap memiliki relevansi untuk diterapkan dalam berbagai lingkungan sosial. Nilai tepa selira dapat mendorong individu untuk mengembangkan empati, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap orang lain, sedangkan unggah-ungguh dan andhap asor dapat membentuk sikap santun dan rendah hati dalam berinteraksi. Oleh karena itu, nilai budaya lokal dapat menjadi salah satu pedoman dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah perbedaan latar belakang, pandangan, dan keyakinan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya Jawa merupakan warisan nilai luhur yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem sosial dan tradisi, tetapi juga sebagai

pedoman moral dan spiritual yang relevan untuk menjaga keharmonisan, toleransi, dan identitas bangsa di era modern. Nilai unggah-ungguh, andhap asor, dan tepa slira mengandung nilai kesopanan, kerendahan hati, empati, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap orang lain. Dalam konteks penelitian ini, nilai-nilai budaya Jawa tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari budaya lokal yang berpotensi membentuk sikap mahasiswa dalam menghargai perbedaan, saling menghormati, membangun kerja sama, serta mendukung terciptanya kerukunan di lingkungan perguruan tinggi.

Budaya Jawa merupakan sistem nilai, norma, dan tata laku yang menjadi pedoman hidup masyarakat Jawa dalam berinteraksi dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Menurut Koentjaraningrat (2009:3), budaya Jawa mencerminkan pandangan hidup yang menekankan keseimbangan, ketertiban sosial, dan pengendalian diri untuk mencapai harmoni dalam kehidupan. Geertz (1983) menambahkan bahwa budaya Jawa memiliki lapisan simbolik yang kompleks, di mana setiap perilaku sosial mengandung makna filosofis dan religius yang mendalam. Sementara itu, hasil penelitian Rahmawati dan Suyatno (2021) menunjukkan bahwa budaya Jawa di era modern tetap mempertahankan nilai-nilai etika seperti unggah-ungguh (tata krama), andhap asor (rendah hati), dan tepa slira (toleransi) sebagai

dasar pembentukan karakter dan kerukunan sosial di tengah perubahan zaman.

Dari ketiga pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya Jawa merupakan warisan nilai luhur yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem sosial dan tradisi, tetapi juga sebagai pedoman moral dan spiritual yang relevan untuk menjaga keharmonisan, toleransi, dan identitas bangsa di era modern.

d. **Indikator Nilai Budaya Lokal**

Menurut Budiyo dan Yoga (2017:93), indikator budaya lokal Jawa sebagai berikut:

1) *Aja Dumeh*

Aja dumeh ungkapan sederhana tetapi mengandung arti mendalam. Bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia lebih kurang jangan sok. Pengertian *aja dumeh* adalah suatu sikap seseorang yang mendorong untuk berbuat sewenang-wenangnya menurut kehendak sendiri, sehingga lupa diri

2) *Tepa Selira*

Tepa selira secara sederhana dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia tenggang rasa. *Tepa selira* merupakan perilaku seseorang yang mampu memahami perasaan orang lain. Dengan demikian orang yang mempunyai *tepa selira* tidak akan bertindak sewenang-wenang jika ia menjadi pemimpin. Kalau dicubit merasa sakit, ya, jangan mencubit.

Tepa selira artinya mampu memahami perasaan orang lain (empati) dalam dunia barat di kenal dengan istilah *trial by the press*. Pada dasarnya seseorang yang mempunyai *tepa selira* adalah tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan untuk menyalahkan orang lain. *Tepa selira* dapat diartikan pula setiap orang menghormati hak-hak azasi manusia dan menghormati pendapat orang lain.

3) *Mawas Diri*

Mawas diri adalah mengadakan penelitian dan memeriksa didalam hati nurani, apakah tindakan yang dilakukan sudah benarsesuai dengan norma-norma dan tata nilai ataukah belum. *Mawas diri* identik dengan anti intronspeksi. Bagi masyarakat Jawa senang menjalankan *mawas diri* dan berusaha untukselalu menjadi pedoman cara bertindak guna mendapat jawaban atas persoalan yang dihadapinya.

4) *Budi Luhur*

Bagi masyarakat Jawa dalam mendidik putra-putrinya semenjak mereka kecil sudah dididik menimbang baik dan buruknya suatu perbuatan. Pendidikan budi luhur melatar belakangi pendidikan budi pekerti yang diajarkan di dalam lingkungan keluarga basis atau inti, maupun di dalam sekolah oleh para guru. Sayang sekali pendidikan budi pekerti di sekolah dewasa ini kurang mendapatkan perhatian. Hal ini

disebabkan dalam kurikulum tidak dicantumkan pendidikan budi pekerti.

5) Sikap Wani Tombok

Wani tombok berarti berani menanggung rugi demi harga diri. Sikap wani tombok bagi masyarakat Jawa adalah sikap berani menanggung risiko atau rugi. Sikap tersebut merupakan sikap perwira yaitu sikap terpuji karena mau memberi bantuan bila ada kekurangan, misalnya biaya yang seharusnya ditanggung bersama secara patungan ternyata kurang. Kekurangan itulah yang ditanggung orang berani tombok. Berani tombok bagi orang Jawa bukan mencari muka atau pujian, tetapi demi terlaksananya tujuan bersama.

6) Mendhem Jero Mikul Dhuwur

Ungkapan ini harus ditujukan kepada anak-anak atau para remaja kita terutama masyarakat Jawa. Mendhem jero artinya menutupi lubang sedalam-dalamnya dengan tanah yang telah digali, mikul dhuwur artinya mikul = memikul; dhuwur = atas. Jadi anti harafiah yaitu menutup, lubang sampai sedalam-dalamnya dan memikul sampai atas. Maksud ungkapan tersebut adalah kita sebagai anak atau generasi penerus harus melupakan atau melenyapkan keburukan, kejelekan atau kesalahan orangtua apalagi orangtua kita yang sudah meninggal dunia.

7) Sifat Gemi, Nastiti dan Ngati-ati

Para orang tua dalam budaya Jawa, selalu menasihati putra-putrinya untuk bersikap gemi artinya pandai menghemat. Pada dasarnya gemi adalah selalu memperhitungkan secara cermat untuk mengeluarkan uang. Pengertian gemi atau hemat pengeluaran bukanlah pelit melainkan dapat membedakan apa yang perlu dibeli dan apa yang belum perlu dibeli.

e. **Budaya Dalam Agama Buddha**

Ajaran Buddha sangat menghargai keragaman dan berusaha untuk menjaga keharmonisan sambil memupuk toleransi dan cinta damai. Hal ini terlihat dari sejumlah ajaran Buddha yang salah satunya dimuat dalam Prasasti Raja Asoka.

“Jangan sampai kita tidak menghormati agama lain dengan menjelekkkan agama kita sendiri. Di sisi lain, ada alasan tertentu mengapa agama lain harus dihormati. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya memajukan agama lain tetapi juga memajukan agama kita sendiri. Jika kita bertindak berbeda, baik iman kita maupun orang lain akan menderita. Oleh karena itu, siapa pun yang menghormati agamanya sendiri sambil merendahkan agama lain akan sangat merugikan agamanya sendiri karena hanya didorong oleh rasa setia pada agamanya sendiri dan pemikiran, "Bagaimana saya bisa memuliakan agama saya sendiri?" Alhasil, perdamaian

diusung dengan konsep bahwa setiap orang harus memperhatikan dan menghargai pelajaran orang lain.”

Dalam Kalama Sutta, Sang Buddha memberikan nasihat yang sangat jujur. Sang Buddha memberikan panduan ini kepada sekelompok anak muda untuk memeluk suatu agama secara logis. Sang Buddha tidak pernah menyarankan bahwa siapa pun menerima agama hanya atas dasar keyakinan mereka sendiri, tetapi mereka melakukannya sambil berusaha memahaminya secara objektif.

Maka dari itu, sudah lazim menyebut suatu agama yang berdasarkan ajaran-Nya sebagai agama yang rasional. Nasihat Sang Buddha diberikan dalam Kalama Sutta (A.I.188-193) dan untuk tidak menerima apapun hanya berdasarkan tradisi atau desas-desus. Dia juga menyarankan agar tidak menerima apa pun hanya berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Jangan pernah menerima apapun hanya berdasarkan tebakan, otoritas kitab-kitab agama, atau penalaran dan argumen pribadi Anda sendiri. Jangan mengambil apa pun begitu saja karena Anda percaya ini adalah Guru kita.

Dalam Brahmajala Sutta, Sang Buddha menasihati murid-muridnya untuk tidak bereaksi dengan marah ketika orang lain menghina-Nya, ajarannya, dan murid-muridnya. Situasi serupa muncul ketika orang memuji-Nya, Ajaran-Nya, dan Murid-murid-

Nya tetapi kemudian menuntut penjelasan mengapa beberapa hal tidak benar. (D.I. 2-3).

Sang Buddha memberikan panduan tentang bagaimana memelihara kedamaian dalam Upali Sutta selain dalam Brahmajala Sutta. Para biksu Buddha masih melakukan praktik pertapaan tradisional India untuk pergi dari rumah ke rumah. (M.I. 371-3).

"Enam Faktor yang Membawa Keharmonisan" (Saraniyadhamma), yang juga diajarkan Sang Buddha, adalah hal-hal yang dapat dipraktikkan untuk menjaga keharmonisan. Yaitu sebagai berikut: (1) cinta diwujudkan dalam perbuatan; (2) cinta diwujudkan dalam ucapan; (3) cinta diwujudkan dalam pikiran dan pikiran, dengan memiliki itikad baik terhadap orang lain; (4) memberi kesempatan kepada orang lain untuk menikmati apa yang diperoleh secara halal; (5) di depan umum atau pribadi dia menjalani kehidupan moral, tidak melakukan apapun; (6) Memiliki keyakinan yang sama baik secara publik maupun pribadi, yang membebaskannya dari rasa sakit dan menginspirasi dia untuk berperilaku sejalan dengan keyakinan itu, hidup dalam damai, dan menghindari pertengkaran perbedaan pendapat dalam keyakinan (A.III.288-89).

f. Relevansi Nilai Budaya Lokal terhadap Kerukunan

Nilai-nilai budaya lokal memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memelihara kerukunan di lingkungan mahasiswa. Budaya lokal, khususnya dalam konteks budaya Jawa, mengajarkan prinsip-prinsip etika sosial seperti *tepa slira* (toleransi), *gotong royong* (kerjasama), *andhap asor* (rendah hati), dan *rukun* (harmoni), yang menjadi fondasi bagi terciptanya hubungan sosial yang damai dan saling menghormati. Menurut Budiyono dan Yoga (2017), nilai-nilai tersebut membentuk kesadaran kolektif yang mendorong individu untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, sehingga mampu mencegah konflik sosial di lingkungan akademik.

Hasil penelitian Lutfiyani dan Ashoumi (2022:18) menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui proses pembelajaran mampu membentuk sikap toleransi, menghargai keberagaman, serta memperkuat karakter antiradikalisme pada mahasiswa. Selain itu, Patih dkk. (2023:67) menjelaskan bahwa penguatan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berkontribusi dalam membangun sikap moderasi beragama, toleransi, serta kemampuan mahasiswa untuk hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman. Temuan tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi dan pendidikan karakter di lingkungan

perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan kampus yang inklusif dan rukun.

Hasil penelitian Mazid, Prasetyo, dan Farikah (2020:249) menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat, seperti sikap saling menghargai, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan melalui berbagai aktivitas pendidikan sehingga mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis. Hal ini sejalan dengan pendapat Setyawan (2022) yang menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai budaya lokal melalui pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat memperkuat moderasi beragama dan toleransi antar mahasiswa.

Dengan demikian, nilai budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang relevan untuk menumbuhkan kesadaran multikultural dan menjaga kerukunan di kalangan mahasiswa. Integrasi nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan kampus dapat memperkuat solidaritas, memperkaya interaksi sosial, dan menciptakan iklim akademik yang inklusif dan harmonis.

3. Kerukunan

a. Pengertian Kerukunan

Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antarumat beragama merupakan cara atau sarana untuk mempertemukan dan mengatur hubungan antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kerukunan berarti kebaikan dan kedamaian yang tidak bertentangan. Kesatuan dapat tercipta apabila kerukunan tercipta. Syarat utama persatuan, yaitu kerukunan. Persatuan dan kesatuan diperlukan dalam keberagaman untuk menciptakan ketenangan Samsudin, (2018:14). Kerukunan adalah kehidupan harmonis yang dibangun berdasarkan kebaikan, perdamaian, dan persatuan untuk mencapai kesepakatan, yang mengarah pada terwujudnya kehidupan yang rukun dan harmonis yang baik dan damai, Darmansyah (2018:3).

Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keberagaman agama, kerukunan tidak berarti merelatifkan agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas atau sinkretisme agama. Kerukunan antarumat beragama merupakan cara atau sarana untuk mempertemukan dan mengatur hubungan antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan

sosial kemasyarakatan (Said, 2005:5). Dengan demikian, kerukunan tidak menghilangkan perbedaan keyakinan, tetapi memberikan ruang kepada setiap individu atau kelompok untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan tetap menghormati keberadaan dan keyakinan orang lain.

Pemahaman tersebut diperkuat oleh Riyanto (2022:9) yang menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Ketiga dimensi tersebut merupakan hasil yang diharapkan dari proses moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Toleransi berkaitan dengan kemampuan menerima dan menghargai perbedaan, kesetaraan berkaitan dengan pemberian hak dan kesempatan yang sama tanpa mengedepankan superioritas, sedangkan kerja sama menunjukkan keterlibatan aktif bersama kelompok lain dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kerukunan tidak hanya ditandai oleh tidak adanya pertentangan, tetapi juga oleh adanya hubungan sosial yang positif dan saling menghargai.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Santoso, Istiawan, dan Khikmah (2022:70–84) melalui penelitian mengenai indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa kerukunan dapat dilihat melalui dimensi toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kerukunan umat beragama merupakan kondisi yang dibangun melalui kemampuan masyarakat dalam menerima perbedaan, memberikan perlakuan yang setara, serta melakukan kerja sama dalam kehidupan sosial. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan yang rukun tidak hanya berkaitan dengan sikap menerima keberadaan kelompok lain, tetapi juga membutuhkan hubungan sosial yang aktif dan konstruktif.

Konsep tersebut tetap digunakan dalam pengukuran kerukunan umat beragama di Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia (2024) menjelaskan bahwa Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama mengukur kerukunan melalui tiga aspek utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Toleransi menunjukkan sikap saling menerima dan menghargai perbedaan, kesetaraan menunjukkan adanya perlakuan dan kesempatan yang sama, sedangkan kerja sama menunjukkan keterlibatan bersama dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar untuk melihat kehidupan keberagamaan yang damai dan harmonis dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerukunan adalah kondisi kehidupan yang damai, tenteram, harmonis, dan saling menghargai yang terwujud melalui kemampuan menerima perbedaan, menghormati keyakinan orang lain, memberikan kesempatan yang setara, serta membangun kerja

sama dalam kehidupan bersama. Kerukunan antarumat beragama bukan berarti menghilangkan perbedaan keyakinan, tetapi merupakan kesediaan untuk hidup berdampingan dengan tetap memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan ajaran agamanya. Dalam penelitian ini, kerukunan mahasiswa dipahami sebagai kemampuan mahasiswa untuk membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman agama, budaya, dan latar belakang yang diwujudkan melalui toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

b. Pengertian kerukunan Umat Beragama

Landasan kerukunan umat manusia dalam menghargai hak asasi manusia dalam beribadah bukan merupakan keinginan tanpa tujuan. Namun sejatinya kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau golongan, Sairin (2006:9). Namun berjalannya waktu, sejarah telah mencatat ada begitu banyak intoleransi yang mengganggu hidup kemajemukan sebagai bagian identitas bangsa Indonesia. Sehingga pemerintah dengan alasan menghindari pertikaian yang terjadi maka menerbitkan tri kerukunan hidup beragama.

Dalam peraturan Bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006/ Nomor 8 tahun 2006, Pemerintah secara resmi menggunakan konsep terminologi untuk kerukunan

hidup umat beragama mencakup tiga kerukunan yaitu: (1) Kerukunan intern umat beragama; (2) Kerukunan antarumat beragama; (3) Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

1) Kerukunan intern umat beragama

Yaitu kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama seperti kerukunan di antara aliran-aliran/pahampaham/mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. a. Pertentangan di antara pemuka agama yang bersifat pribadi jangan mengakibatkan perpecahan di antara pengikutnya. b. Persoalan intern umat beragama dapat diselesaikan dengan semangat kerukunan atau tenggang rasa dan kekeluargaan.

2) Kerukunan antar umat beragama

Yaitu kerukunan di antara umat agama yang berbeda-beda seperti kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.

a) Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang penyiaran agama sebagai role of game bagi penyiaran dan pengembangan agama untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama.

- b) Pemerintah memberi pedoman dan melindungi kebebasan memeluk agama dan melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing.
 - c) Keputusan bersama Mendagri dan Menag No. 1 Tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri bagi lembaga keagamaan di Indonesia.
- 3) Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah

Yaitu kerukunan antar umat agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama.

- a) Semua pihak menyadari kedudukannya masing-masing sebagai komponen Orde Baru dalam menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b) Antara pemerintah dengan umat beragama ditemukan apa yang saling diharapkan untuk dilaksanakan.
- c) Pemerintah mengharapkan tiga prioritas, umat beragama diharapkan berpartisipasi aktif dan positif dalam:

- (1). Pemantapan ideologi Pancasila
- (2). Pemantapan Stabilitas dan Ketahanan Nasional
- (3). Suksesnya Pembangunan Nasional

c. Indikator Kerukunan Mahasiswa

Menurut Muhammad Adlin Sila dan Fakhruddin (2020:3)

Indikator kerukunan dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Toleransi adalah Toleransi yang menyangkut sikap saling menerima, menghargai perbedaan.
- 2) Kesetaraan pandangan dan sikap hidup menganggap semua orang adalah sama dalam hak dan kewajiban. Hak atas melaksanakan agama beribadah dan kewajiban terhadap kehidupan bernegara dan bersosialisasi dengan penganut agama lain sebagai sesuatu yang alamiah.
- 3) Kerja sama meliputi kerja sama aktif dengan pihak lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dan agama.

Menurut Sila (2020:15) sub indikator kerukunan dibagi menjadi sub indikator sebagai berikut:

- 1) Toleransi adalah penerimaan perbedaan kepercayaan, sub indikator sebagai dasar penarikan pertanyaan/pernyataan :

Penerimaan (*acceptance*)

- a) Menciptakan peluang untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda;
- b) Menciptakan suasana nyaman;

- c) Tidak menggunakan kekerasan (paksaan) terhadap keyakinan dan adat yang bertentangan;
- d) Menghargai keragaman budaya;
- e) Mengenal toleransi.

Menghormati

- a) Kesediaan untuk menghormati;
 - b) Menghargai;
 - c) Menghormati hak orang lain.
- 2) Kesetaraan adalah persamaan yang diartikan antara lain sebagai pandangan hidup serta hak dan kewajiban yang sama.
- a) Ukuran kesetaraan dari berbagai sumber (menolak diskriminasi; hubungan; timbal balik) telah mencapai tingkat yang sama.
 - b) Memiliki kesempatan yang sama (kebebasan beragama; perlindungan hak orang lain).
 - c) Memberikan perlindungan (perlindungan dari berbagai hinaan agama).
- 3) Kerja Sama adalah tindakan yang berjalan beriringan dan mendapatkan manfaat bersama.
- a) Partisipasi aktif orang-orang yang bergabung dengan pihak lain.
 - b) Bersimpati dan empati.
 - c) Tolong menolong atau gotongroyong.

d. **Kerukunan Dalam Agama Buddha**

Kerukunan hidup beragama adalah kondisi bagi semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan yang dimaksud bukan berarti penganut agama yang satu tidak merasa perlu atau menahan diri untuk melibatkan persoalan keberagamaan dengan pihak lain, karena kebersamaan menghendaki tenggang rasa, yang benar-benar dimungkinkan jika saling memahami.

Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Setuju dalam perbedaan berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan dan pola hidupnya, menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya sendiri. Memelihara kerukunan hidup umat beragama tidaklah berarti mempertahankan status quo sehingga menghambat kemajuan masing-masing agama. Kerukunan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat yang dinamis, yang menghadapi beraneka tantangan dan persoalan.

Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, sang Buddha menganjurkan, "terdapat enam Dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling

menolong, saling menghindari percekcoan, yang akan menunjang kerukunan persatuan dan kesatuan. Keenam Dharma itu adalah:

- 1) Memancarkan cinta kasih (metta) dalam perbuatan kita sehari-hari, maka kedamaian, keharmonisan dan kerukunan dan persatuan akan terwujud.
- 2) Menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etikat baik, tak menyebarkan isu, gossip dan fitnahan.
- 3) Selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka.
- 4) Menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dan rasa kepedulian sosial.
- 5) Melaksanakan moral (sila), etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat. Tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain.
- 6) Mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut, hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan (Angguttara Nikaya III, 288-289).

e. Peran Kerukunan dalam Lingkungan Kampus

Kerukunan memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif, harmonis, dan produktif di lingkungan kampus. Kampus merupakan ruang

pertemuan bagi individu dari berbagai latar belakang agama, suku, budaya, dan pandangan hidup, sehingga potensi perbedaan dapat menimbulkan gesekan apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, kerukunan berfungsi sebagai landasan sosial yang menumbuhkan sikap saling menghormati, toleransi, serta kerja sama antarmahasiswa dan civitas akademika. Menurut Mo'tasim dan Alfiatin (2024:241), implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi mampu meningkatkan toleransi, memperkuat kohesi sosial, serta menciptakan lingkungan akademik yang harmonis dan inklusif.

Selain itu, kerukunan di lingkungan kampus berperan penting dalam memperkuat semangat kebangsaan dan memperkuat moderasi beragama. Sukrawati et al. (2023:105) menjelaskan bahwa penguatan moderasi beragama di perguruan tinggi mampu meningkatkan sikap toleransi mahasiswa serta membentuk karakter yang menghargai keberagaman sehingga tercipta kehidupan kampus yang harmonis dan inklusif.

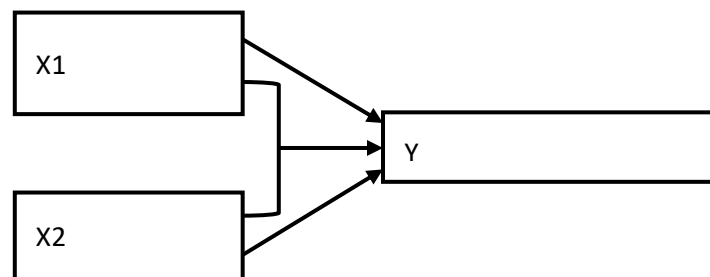
Dengan demikian, peran kerukunan di lingkungan kampus tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan budaya akademik yang damai dan kolaboratif. Melalui kegiatan dialog antaragama, pengabdian masyarakat lintas budaya, serta kebijakan kampus yang berorientasi pada inklusivitas, nilai-nilai kerukunan dapat terus dipelihara dan dikembangkan. Hal ini pada akhirnya akan

melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berjiwa toleran dan berperan aktif dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat.

C. Kerangka Berfikir

Teori yang memiliki hubungan dari berbagai faktor sebagai identifikasi masalah yang penting dengan model konseptual (Sugiyono, 2018:60). Variabel penelitian ini adalah moderasi beragama, budaya lokal sebagai variabel bebas (Independen), kerukunan sebagai variabel terikat (Dependen). Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh moderasi beragama terhadap kerukunan, pengaruh budaya lokal terhadap kerukunan.

Gambar 2.1
Kerangka Variabel



Keterangan:
 X1 : Moderasi Beragama
 X2 : Budaya Lokal
 Y : Kerukunan

A. Hipotesis Penelitian

Pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta empiris dan teori yang relevan terhadap jawaban sementara pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2018:96).

- Ha¹: Terdapat pengaruh moderasi beragama terhadap kerukunan mahasiswa.
- Ha²: Terdapat pengaruh budaya lokal terhadap kerukunan mahasiswa.
- Ha³: Terdapat pengaruh moderasi beragama dan budaya lokal terhadap kerukunan mahasiswa.